

20

23

LKjIP

**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKjIP Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dicapai. Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2023, sedangkan kegagalan akan dijadikan pembelajaran dan akan dibenahi di tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP BALITBANGDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian LKjIP BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara dan semoga LKjIP ini telah dapat mencerminkan kinerja BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Manado, Februari 2024

**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


Drs. JOI E.B. OROH,

**PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650101 199303 1 029**

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Hal
1.3.1	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal	4
1.3.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Eselonisasi	5
1.3.3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan	5
1.3.4	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Struktural	5
1.3.5	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Fungsional	6
1.3.6	Jumlah Laptop Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara	7
1.3.7	Jumlah Komputer PC Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara	7
1.3.8	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara	7
1.3.9	Jumlah Jumlah Peralatan Lain - Lain	7
2.2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balitbangda Tahun 2023	13
2.2.2	Penetapan Kinerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	13
3.1.1	Penilaian Persentase Kinerja	14
3.1.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulut	14
3.1.3	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 capaian Tahun lalu dan Target Tahun yang akan datang	16
3.2.1	Realisasi Keuangan TA 2023	20

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Sumber Daya PD Balitbangda	4
1.3.1. Sumber Daya Manusia	4
1.3.2. Sarana dan Prasarana	6
1.4. Aspek Strategis Litbang Daerah	8
1.5. Isu-isu Strategis Balitbangda	8
1.6. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026	10
2.1.1. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026	10
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026	11
2.1.3. Program dan Kegiatan Strategis Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	12
2.2. Penetapan Kinerja Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	14
B. Realisasi Keuangan Tahun 2023	20
BAB IV PENUTUP	22
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dibentuk berdasarkan Permendagri nomor 17 Tahun 2016 yang diatur melalui PERDA Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Balitbangda Tipe C yang telah diatur kembali dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Balitbangda memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan kelitbang dalam menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penelitian dan pengembangan, harus diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam TAP MPR RI NO. IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas dan Fungsi Balitbangda sebagai berikut :

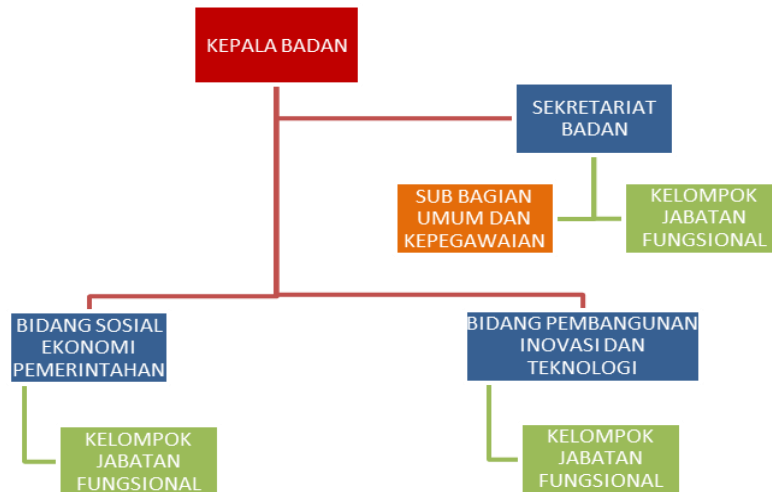
1. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program, kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Melaksanakan kelitbangan di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara;
3. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
4. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
6. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi dan di pemerintahan kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
7. Melakukan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
8. Memastikan tersusunnya kebijakan dan regulasi berbasis hasil kelitbangan di provinsi;

9. Melaksanakan administrasi kelitbangan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;
11. Meminta laporan atau hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga asing;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Pergub No. 12 Tahun 2022 seperti gambar berikut:

Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe "C" (Pergub 12 Tahun 2022)



Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

I. Majelis Pertimbangan

- Ketua : Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Anggota : 1. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado
2. Rektor Universitas Negeri Manado
3. Rektor Universitas Dela Sale

II. Tim Pengendali Mutu

Penanggung jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ketua : Sekretaris Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : Pelaksana/Ahli

Sekretariat TPM (lingkup Balitbangda)

Ketua : Pejabat Administrator

Sekretaris : Pejabat Pengawas / Fungsional Muda

Anggota : Pelaksana

III. Unsur Pelaksana

IV. Surveyer

V. Narasumber dan Responden

1.2.3. SUMBER DAYA PD BALITBANGDA

1.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 1.3.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S.3 (Doktoral)	1	1	2
2.	S.2(Pasca Sarjana)	2	8	10
3.	S.1 (Sarjana)	9	7	16
4.	D1 – D3(Diploma)	-	1	1
5.	SLTA/Sederajat	-	-	-
6.	SLTP/Sederajat	-	-	-
	Jumlah	12	17	29

Sumber : Subag Umum Dan Kepegawaian tahun 2023

Tabel 1.3.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

No.	Tingkat Eselon	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	1	2	3
4.	Eselon IV	-	1	1
5.	Pejabat Fungsional Madya	1	1	2
6.	Pejabat Fungsional Muda	1	3	4
7.	Pejabat Fungsional Pertama	-	1 (PPPK)	1
8.	Pejabat Fungsional Umum	9	9	18
9.	Tenaga Harian Lepas (THL)	3	1	4
	Jumlah	16	18	34

Sumber : Subag Umum Dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel 1.3.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Status Kepegawaian	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	5	5	10
2.	Golongan III	8	11	19
3.	Golongan II	-	-	-
4.	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	13	16	29

Sumber : Subag Umum Dan Kepegawaian Tahun 2023

Tabel 1.3.4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Struktural

No.	Diklat Struktural	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Diklat LEMHANAS	-	-	-
2	PIM I	-	-	-
3	PIM II	1	-	1
4	PIM III/ SPAMA	2	2	4

5	PIM IV/ ADUM	1	1	2
6	PRAJABATAN	10	11	22

Sumber : Subag Umum Dan Kepegawaian Tahun 2023

Tabel 1.3.5. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Fungsional

No.	Diklat Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Diklat Barang dan Jasa	1	3	5
2	Diklat Keuangan	-	1	1
3	Diklat Perencanaan	-	-	-
4	Diklat Peneliti	1	-	-
5	Diklat Kepustakaan	-	-	-
	Jumlah	2	4	6

Sumber : Subag Umum Dan Kepegawaian Tahun 2023

1.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan komponen strategis yang menentukan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selain komponen sumber daya manusia dan anggaran.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada dasarnya relatif memadai, meskipun harus di tingkatkan secara berkelanjutan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara ke depan yang semakin kompleks utamanya dalam penyediaan data dan informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Prasarana perkantoran Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara yang berupa Tanah dan Bangunan berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dan sekarang dalam proses hibah. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pokoknya, Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara telah di dukung oleh peralatan yang cukup memadai dijelaskan dalam table berikut.

Tabel 1.3.6. Jumlah Laptop Balitbangda Prov. Sulut

No.	Merek Laptop	Jumlah	Keterangan
1.	Lenovo	8	7 Baik dan 1 Rusak
2.	Sony	1	Rusak Berat
3.	Acer	9	Rusak Berat 1, dan Baik 8
4.	Hp	1	Rusak
	Jumlah	17	

Tabel 1.3.7 Jumlah Komputer PC Balitbangda Prov. Sulut

No.	Merek PC	Jumlah	Keterangan
1	Lenovo	6	4 Baik dan 2 Rusak
2	Axioo	1	Rusak Berat (Pengadaan eks UPTB Litbang Bappeda Tahun 2011)
3	Acer	1	Rusak Ringan (Pengadaan 2021)
	Jumlah	8	

Tabel 1.3.8 Jumlah Kendaran Dinas Roda 4 (empat) Balitbangda Prov Sulut

No.	Merek Mobil	Jumlah	Keterangan
1	Toyota Fortuner	1	Baik (Pengadaan eks Korpri Tahun 2011)
2	Toyota Innova	1	Baik (Pengadaan eks Biro SDA Tahun 2008)
3	Toyota Innova	1	Baik (Pengadaan Balitbangda Tahun 2022)
	Jumlah	3	

Tabel 1.3.9 Jumlah Peralatan Lain - Lainnya

No.	Janis	Jumlah	Keterangan
1	Meja Rapat	1 Unit	Pengadaan Tahun 2019
2	Gorden Jendela	200 M	Pengadaan tahun 2019
3	Kursi Kerja	8 Unit	Pengadaan Tahun 2019

4	Sound Sistem	1 Set	Pengadaan Tahun 2019
5	Pompa Air dan Tong Air	1 Set	Pengadaan Tahun 2019
6	AC Split	7 Buah	Pengadaan Tahun 2019, 2023
7	AC Standing	1 Buah	Pengadaan Tahun 2019
8	Kursi Pejabat	1 Buah	Pengadaan Tahun 2019

1.4. ASPEK STRATEGIS LITBANG DARAH

Aspek strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut yaitu menunjang Visi dan misi kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Blitbangda yaitu hasil kelitbangan yang sudah diimplementasikan serta Inovasi Daerah yang diterapkan oleh daerah.

1.5. ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA

Sementara isu-isu strategis Balitbangda yang perlu diperhatikan dan dikedepankan yaitu :

1. Masih kurangnya evaluasi mengenai berapa banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan baik organisasi ataupun kelompok masyarakat sehingga minimnya data mengenai pemanfaatan kelitbangan untuk dituangkan di dalam laporan kinerja.
2. Masih kurang inovasi-inovasi yang ada.
3. Dalam Rangka transformasi ke BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) perlu dimaksimalkan tugas koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait Riset dan Inovasi serta penerapannya.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BALITBANGDA selama tahun 2023. Analisis atau capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BALITBANGDA Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014

Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BALITBANGDA, Struktur organisasi dan permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BALITBANGADA Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BALITBANGDA dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BALITBANGADA Tahun 2023. dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana strategis (Renstra) Balitbangda di Mulai Tahun 2021-2026 seiring dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Renstra Balitbangda berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dengan berorientasi pada hasil yang hendak dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara.

2.1.1. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026.

Dalam menetapkan visi tentu harus mengacu pada visi Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"**. Untuk mendukung Visi tersebut diatas, maka diambil beberapa langkah yang disebut sebagai Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;
4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan;
5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Didukung oleh sinergitas antar Daerah;

2.1.2. Tujuan dan Sasaran BALITBANGDA Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan misi BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis BALITBANGDA. Adapun tujuan yang hendak dicapai BALITBANGDA adalah :

1. Menyediakan sumber referensi dan rekomendasi penelitian dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
2. Menunjang Balitbangda dalam proses penelitian dan pengembangan yang berbasis kelitbangan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan reformasi birokrasi Balitbangda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara;
4. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Provinsi Sulawesi Utara yang berbasis kelitbangan;
5. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan;
6. Tujuan pembinaan pelaksanaan dan pengembangan inovasi daerah;
7. Untuk mencapai tujuan penguatan kebijakan inovasi daerah;
8. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan ;
9. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM kelitbangan.

Berdasarkan tujuan di atas, maka sasaran BALITBANGDA adalah :

1. Tersedianya dokumen sebagai referensi dan rekomendasi dari hasil kelitbangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
2. Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang proses penelitian dan pengembangan;
3. Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi;
4. Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan;
5. Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi;
6. Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan lingkup pemerintah daerah;
7. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah;

8. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Meningkatnya kualitas implementasi inovasi daerah;
10. Tersedianya kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah;
11. Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan yang berpedoman pada RPJMD;
12. Tersedianya pedoman penyelenggaraan kelitbangan;
13. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kelitbangan;
14. Tersedianya sumber daya manusia fungsional kelitbangan yang kompeten dan professional;
15. Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur kelitbangan yang berkompeten;

2.1.3. Program dan Kegiatan Strategis BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara 2023

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, maka untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat beberapa kegiatan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2023 guna mendukung pencapaian kinerja organisasi, yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan Kajian Aktual Gambaran Literasi tentang Stunting pada Remaja di Kota Bitung, Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan tujuan mendapatkan gambaran literasi kesehatan tentang stunting pada remaja.
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang membuat Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Energi Terbarukan Biogas dari Limbah Kotoran Ternak Babi di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. Maksud dari pelaksanaan kajian ini yaitu menyediakan dokumen ilmiah untuk menjawab pertanyaan kelitbangan dan rumusan masalah tentang Bagaimana kelayakan pengembangan biogas dari limbah kotoran ternak babi sebagai energi terbarukan berbasis individu dan kelompok peternak di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

3. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, yang membuat kajian terkait Upaya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dalam pengembangan IKM di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Selain itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah juga melaksanakan Fasilitasi Inovasi Daerah terhadap Perangkat Daerah dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke dalam Kegiatan Sistem Inovasi Daerah. Kegiatan ini juga menjadi tolak ukur penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.2. PENETAPAN KINERJA BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan kinerja BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang pada setiap tahunnya ditetapkan kinerja BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara dalam suatu Perjanjian Kinerja antara BALITBANGDA dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara. Berikut ini sasaran strategis dan indikator kinerja BALITBANGDA tahun 2023 :

Tabel 2.2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BALITBANGDA Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
	Persentase Inovasi Daerah

Selanjutnya kinerja BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala BALITBANGDA dengan Gubernur Sulawesi Utara, akan dirinci pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.2 Penetapan Kinerja BALITBANGDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	45 %
	Persentase Inovasi Daerah	45 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Penilaian presentase pencapaian pengukuran kinerja kegiatan yang didasarkan atas indikator kinerja dan indikator sasaran dimaksud dengan kategori capaian kinerja menurut persentase sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Penilaian Persentase Kinerja

Pencapaian Target	Kategori Capaian Kinerja
85 s.d 100	Sangat Baik
70 s.d 84	Berhasil
55 s.d 69	Cukup Berhasil
0 s.d 54	Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah ditetapkan sampai pada akhir tahun 2023, maka secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	45%	47,37%
	Persentase Inovasi Daerah	45%	48,71%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi Daerah terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase

inovasi Daerah. Target 45% untuk pemanfaatan hasil kelitbangan dan direalisasikan 47,71% dan Persentase inovasi Daerah target 45% dapat direalisasikan 48,71%.

Pada Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, dihitung berdasarkan hasil kelitbangan dalam bentuk rekomendasi yang dihasilkan dalam setiap kajian/ kelitbangan. Rekomendasi yang dihasilkan akan dievaluasi dalam penerapannya pada Perangkat Daerah/ Institusi/ pelaksana rekomendasi. Sehingga akan didapati adanya rekomendasi yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti. Bentuk tindaklanjut dapat berupa diakomodirnya rekomendasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah/ Institusi/ pelaksana rekomendasi. Persentase dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Hasil Kelitbangan ditindaklanjuti}}{\text{Hasil Kelitbangan yang dihasilkan}} \times 100 \%$$

Dalam evaluasi penerapan hasil kelitbangan, dibatasi pada 2 tahun setelah dihasilkan. Dengan asumsi bahwa Perangkat Daerah/ Institusi/ pelaksana rekomendasi membutuhkan 1 tahun dalam merencanakan dan 1 tahun kemudian untuk dilaksanakan. Apabila hasil kelitbangan telah dimasukan/ diakomodir dalam proses perencanaan maka hal tersebut dapat diasumsikan sebagai Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti. Sehingga pencapaian Persentase Hasil Kelitbangan tahun n mengevaluasi Hasil Kelitbangan tahun n-1 dan n-2.

Pada Pemanfaatan Hasil Kelitbangan tahun 2023 dari total 57 rekomendasi yang dihasilkan tahun 2021 & 2022, ada 27 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pada rencana kerja OPD pelaksana hasil kelitbangan. Sehingga diperoleh 47,37% atau mencapai target kinerja 45%.

Pada Indikator Persentase Inovasi Daerah dilihat perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah (SiDA) dengan rumus :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Perangkat Daerah yang Difasilitasi}}{\text{Total Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

sedangkan Persentase Inovasi Daerah mencapai 19 OPD dari total 39 OPD yang ada sehingga kinerja mencapai 48,71% atau memenuhi target 45%.

Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 merupakan evaluasi pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengetahui tingkat kebarhasilan suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun lalu dan perbaikan yang akan dilakukan tahun ini dan tahun yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.1.3 Capaian perjanjian kinerja tahun 2023, capaian tahun lalu dan target tahun yang akan datang beserta penjelasannya, sebagai berikut :

Tabel 3.1.3 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, capaian Tahun lalu dan Target Tahun yang akan datang

Indikator Kinerja	Tahun 2022 (n-1)		Tahun 2023		Target Realisasi n+1
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	40%	45,45%	45%	47,37%	50%
Persentase Inovasi Daerah	35%	41%	45%	48,71%	55%

Berdasarkan tabel 3.1.3 Pertanggungjawaban atau hasil dari keadaan yang capai dari persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan Persentase Inovasi Daerah Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Tahun lalu atau tahun 2022 dan Target Tahun yang akan datang atau tahun 2024 serta penyebab keberhasilan kegagalan maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Capaian Kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan 45% dicapai dengan baik senilai 47,37%. Hal ini dikarenakan jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya masa pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kelitbangan yang ada semakin baik. Meskipun target dokumen masih minim belum sesuai target Renstra karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya kelitbangan yang dilaksanakan.

Target Capaian Kinerja Tahun 2022 Persentase Inovasi Daerah adalah 45% dan dapat direalisasikan 48,71% dengan capaian kinerja yaitu 19 OPD yang difasilitasi

dalam penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dari 39 Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 melakukan desiminasi, Evaluasi dan pengambilan data dari perangkat – perangkat daerah yang merupakan instansi yang menindaklanjuti hasil – hasil kelitbangan tahun 2021 dan 2022 yang terdapat di seluruh Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data – data yang di ambil adalah jumlah rekomendasi yang sudah masuk dalam renja perangkat daerah atau rekomendasi yang sudah di tindaklanjuti oleh Perangkat daerah, berbagai respon dari perangkat daerah yang merupakan tempat pengambilan data yaitu ada yang sudah melaksanakan rekomendasi itu dan ada juga yang belum melaksanakan rekomendasi dari hasil - hasil kelitbangan, dan kami memberikan masukan agar pada tahun yang akan datang agar dapat di masukan di dalam renja perangkat daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel 3.1.3 untuk pada Tahun 2022 indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dari target 40% dapat direalisasikan dengan baik. Adapun Target persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2022 yaitu 33 Rekomendasi dan dapat di capai atau di tindak lanjuti oleh perangkat daerah sampai akhir tahun 2022 yaitu 15 Rekomendasi. Rekomendasinya sangat minim, karena pada tahun 2020 tidak mencapai Kinerja karena seluruh Kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan Refokusing Anggaran Secara Keseluruhan.

Capain Kinerja Inovasi Daerah Tahun 2022 dapat di capai melebihi target dikarenakan ada 16 dari 39 OPD yang dapat difasilitasi dalam Sistem Inovasi Daerah atau mencapai 41%. Sedangkan pada Tahun 2021 dilakukan Fasilitasi Inovasi Daerah meskipun masih ada *Refokusing Anggaran*.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Realisasi Kinerja Balitbangda mulai dari tahun awal periode Renstra 2021-2026 mengalami terjadi Rasionalisasi Anggaran. Pada awal periode penganggaran

pada OPD pelaksana rekomendasi masih kurang yang mengakomodir rekomendasi hasil kelitbangan karena masih fokus pada progam/kegiatan tertentu dampak Pandemi Covid-19. Namun perlahan peningkatan jumlah rekomendasi yang diakomodir meningkat karena proses penganggaranpun semakin baik dan pada tahun 2023 tidak dilaksanakan refocusing anggaran. Secara umum pencapaian ini masih selaras dengan target RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan Fasilitasi Inovasi Daerah tahun 2023 di beberapa Unit Organisasi Pemerintah Provinsi Sulut maupun pembinaan di Kabupaten/Kota untuk mencapai Persentase Inovasi daerah. Perangkat Daerah yang melakukan Inovasi mengalami peningkatan meskipun kuantitas menurun karena dinamika pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang berubah. Awalnya jumlah Inovasi pada suatu pemda menjadi hal utama penilaian, namun saat ini lebih menutamakan kualitas inovasi dengan prioritas menurut kewenangan yang ada pada pemerintah daerah. Meskipun demikian secara umum masih berjalan dengan baik sebagaimana menjadi target pada RPJMD Tahun 2021-2026.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional untuk target sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah belum ada sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah belum dapat melakukan evaluasi dengan Standar Nasional.

5. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan kinerja serta Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan dari indikator Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dapat dicapai tidak lepas dari Kerja sama tim, kemauan dan tekad untuk dapat mencapi hasil yang maksimal dan di tunjang dengan SDM yang ada. Pemanfaatan hasil Kelitbangan bisa tercapai meski hanya sedikit di atas nilai target. Pencapaian ini sebenarnya mendapat ancaman beberapa faktor, seperti :

- a. Rasionalisasi Anggaran akibat dari perhatian/focus pemerintah pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi, sehingga ada anggaran yang harus

dialihkan ke program/kegiatan lain meskipun hal ini tidak dilakukan di tahun 2023.

- b. Adanya hambatan dalam melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Sam Ratulangi, karena alasan internal. Hal ini menyebabkan bergesernya waktu pelaksanaan kajian meskipun tidak terlalu signifikan.

Pada pencapaian target kinerja terkait Persentase Inovasi Daerah masih terdapat hambatan dalam memfasilitasi inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah. Hal ini merupakan dampak dari penganggaran yang masih belum berkelanjutan terhadap inovasi yang sudah ada dan minimnya inovasi yang baru. Inovasi yang ditindaklanjuti terkesan hanya menindaklanjuti inovasi yang muncul dalam Proyek Perubahan pada latsar ataupun diklat kepemimpinan. Kedepan Badan Litbang akan mencoba kolaborasi bersama BPSDM untuk memfasilitasi dan intervensi terhadap Inovasi yang muncul agar mendukung kebutuhan tata Kelola pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada tahun 2023 sumber daya biaya anggaran untuk Belanja Langsung Rp. 1.162.830.108,-. Hal ini setelah mengalami pergeseran anggaran. Sedangkan Anggaran Total untuk membiayai Riset dan inovasi yang ada di Badan Litbang tahun 2023 sejumlah Rp.5.139.290.796,-. Meskipun masih belum berada pada angka ideal namun bisa dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Idealnya anggaran Riset dan Inovasi berada pada 1% dari APBD.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan pejabat pengadaan dari Biro Pengadaan Provinsi Sulut, penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, dan Tenaga Fungsional Peneliti Ahli Madya, Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Madya dan Analis Kebijakan Muda yang ada. Selain itu menentuka skala prioritas dalam perubahan dan pergeseran anggaran.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Secara umum Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan berjalan dengan baik. Pada Program Penelitian dan Pengembangan daerah secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik karena seluruh proses kelitbangan mendapatkan dukungan anggaran yang baik meskipun pada beberapa program mengalami perubahan anggaran untuk memaksimalkan Program Penunjang urusan Pemerintahan Provinsi. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Litbang di tahun 2023 yaitu :

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023

Alokasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp.5.139.290.796,- Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2023 sebagai berikut :

3.2.1. Tabel Realisasi Keuangan TA 2023

URAIAN	PAGU INDUK	REALISASI	
		(Rp.)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.593.926.196	4.547.175.074	96,08

URAIAN	PAGU INDUK	REALISASI	
		(Rp.)	(%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.423.800	65.439.830	99,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.090.600	10.039.700	99,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.133.200	9.994.080	98,63
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.200.000	45.406.050	99,99
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.007.396.688	3.865.799.875	96,30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.976.460.688	3.828.041.825	96,27
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.552.000	32.409.600	99,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.384.000	5.348.450	99,34
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.296.027	18.179.620	99,32
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.296.027	18.179.620	99,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.740.000	37.284.500	98,79
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.740.000	37.284.500	98,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.077.202	141.189.082	97,85
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.437.207	39.513.100	99,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.343.995	14.326.400	99,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.296.000	87.349.582	96,74
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.767.533	78.267.533	99,37
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.767.533	78.267.533	99,37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.337.096	225.676.534	88,14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	51.466.470	89,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.937.096	174.210.064	87,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.887.850	115.338.100	98,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.887.850	115.338.100	98,14
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	545.364.600	398.996.526	98,13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	130.324.020	105.076.100	96,99
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	130.324.020	105.076.100	96,99
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	286.433.930	178.690.600	98,90
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	286.433.930	178.690.600	98,90
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	128.606.650	115.229.826	98,00
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	128.606.650	115.229.826	98,00
TOTAL	5.139.290.796	4.946.171.600	96,24

Berdasarkan Tabel 3.2.1 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki pagu total sebesar Rp.5.139.290.796,- dengan 11 Kegiatan dan 18 sub Kegiatan yang dianggarkan. Adapun realisasi anggaran Rp. 4.946.171.600,- atau 96,24%. Anggaran ini merupakan anggaran hasil perubahan APBD.

BAB IV

PENUTUP


Dari hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian target meningkat secara perlahan dan masih sejalan dengan RPJMD/Renstra tahun 2021-2026. Pencapaian ini masih dalam bayang-bayang pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19 terkait anggaran dalam pelaksanaan rekomendasi maupun inovasi daerah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang telah dilakukan terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun, Balitbang Provinsi Jawa Timur dirasa masih perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut untuk lebih meningkatkan kinerjanya, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM analisis kebijakan di lingkungan Balitbangda Provinsi Sulawesi Utara.
2. Selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder dari tahap perencanaan dalam penentuan tema kelitbangan, selama pelaksanaan dan monev kegiatan dalam rangka menjamin pemanfaatan hasil kelitbangan.
3. Melakukan pendampingan, sosialisasi, serta pemberian arahan dan motivasi secara simultan dari pemerintah pusat (Provinsi) ke daerah (Kabupaten/Kota) untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, swasta dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah.

Manado, Februari 2024

**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**




Drs. JOI E.B. OROH.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650101 199303 1 029

LAMPIRAN-LAMPIRAN